

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SERTIPIKAT
ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
BOJONEGORO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MAULIA ANGGITA ANASTASIA

NIT. 22314287

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026**

ABSTRAK

This research is motivated by the implementation of Electronic Land Certificates as part of the land service digitalization program at the Bojonegoro Land Office. Although this policy aims to improve service efficiency, data security, and legal certainty of land rights, differences in public understanding, trust, service experience, and acceptance of electronic certificates are still evident. This study aims to analyze public perceptions of the implementation of Electronic Land Certificates at the Bojonegoro Land Office and to identify appropriate service strategies to enhance public acceptance of this digital innovation. This study employs a descriptive qualitative method with data collection techniques consisting of interviews, observations, and documentation. The analysis was conducted based on four aspects of public perception, namely public understanding, trust in the security and legality of electronic certificates, service experience, and public acceptance of the implementation of Electronic Land Certificates. The results indicate that public perception of Electronic Land Certificates is generally positive. Most respondents consider electronic certificates to be more practical, efficient, and secure than conventional land certificates. However, several challenges remain, including limited digital literacy, insufficient understanding of the electronic certificate system, and concerns regarding digital data security. To improve public acceptance, the Bojonegoro Land Office has implemented various strategies, including continuous socialization and public education, assistance and guidance for service users, improvements in service quality, and transparent dissemination of information regarding the security and legal validity of Electronic Land Certificates. Therefore, appropriate service strategies play an important role in supporting the successful implementation of Electronic Land Certificates and strengthening public trust in digital land services.

Keywords: public perception, electronic land certificate, land service digitalization, land administration services

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teoritis.....	11
C. Kerangka Berpikir.....	21
D. Pertanyaan Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Format Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Informan dan Teknik Pengambilan informan.....	25

D.	Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	26
E.	Teknik Analisis Data	28
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		30
A.	Kabupaten Bojonegoro	30
B.	Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro	32
C.	Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik	33
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....		38
A.	Persepsi Masyarakat Terhadap Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro	38
B.	Strategi pelayanan yang diterapkan agar dapat meningkatkan penerimaan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro	55
BAB VI PENUTUP		62
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....		65
LAMPIRAN.....		69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era layanan publik yang semakin digital, administrasi pertanahan menjadi salah satu sektor yang dituntut untuk berubah agar mampu menjawab kebutuhan transparansi, kecepatan, dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam konteks tersebut, digitalisasi sistem pertanahan dan reformasi layanan publik menjadi sangat penting untuk dilakukan (Meiliawati, 2024). Kemajuan teknologi telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk sektor administrasi pertanahan. Transformasi digital yang sedang berlangsung mengharuskan individu dan organisasi untuk beradaptasi, karena manusia tidak dapat dilepaskan dari perangkat elektronik, sehingga era digital merupakan administrasi pertanahan di Indonesia (Sugianto, 2020).

Transformasi digital dalam Kementerian ATR/BPN meliputi pendaftaran tanah, pengolahan data, sertipikasi, dan penyimpanan warkah dalam format digital. Upaya modernisasi ini telah diluncurkan sejak sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) pada tahun 2010, yang merupakan pengembangan dari sistem *Land Office Computerization* (LOC) yang diterapkan di tahun 1997 (Pandega dkk., 2023). Penerapan transformasi digital layanan pertanahan diwujudkan melalui kebijakan penggunaan sertipikat elektronik, yang awalnya diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Ketentuan tersebut kemudian dicabut dan diganti oleh Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran tanah (Aditya, 2025). Salah satu tujuan penting dari proses digitalisasi ini adalah memastikan bahwa seluruh bidang tanah sudah terdaftar secara elektronik pada tahun 2024. Melalui program pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis, ATR/BPN memanfaatkan teknologi modern untuk pemetaan dan pengukuran tanah, sehingga data yang diperoleh bisa langsung masuk ke dalam sistem dan diterbitkan menjadi sertipikat elektronik. Mengalihkan ke dalam bentuk elektronik dengan tetap mempertahankan kekuatan hukum yang sah

telah diizinkan berdasarkan Pasal 5 Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi & Informasi Elektronik (UU. ITE).

Pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat tanah merupakan salah satu pilar penting dalam penegakan kepastian hukum atas hak atas tanah di Indonesia, sehingga keberadaan instansi teknis seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kantor pertanahan kabupaten/kota menjadi sangat strategis. Pelaksanaan sertipikasi atau penerbitan sertipikat tanah bukan sekadar administratif birokrasi semata, melainkan juga menyangkut aspek keadilan sosial, kepastian hak kepemilikan, dan pengendalian konflik agraria di masyarakat yang semakin kompleks. Pelaksanaan pendaftaran hak atas di Indonesia yang masih mengandalkan dokumen berbasis kertas dan proses manual menyebabkan kerentanan terhadap kerusakan atau kehilangan arsip, antrean panjang dalam pengurusan, serta risiko tumpang tindih hak yang akhirnya memperbesar potensi sengketa dan konflik lahan antarwarga maupun pihak korporasi. Dengan demikian, transformasi digital dalam administrasi mulai diupayakan sebagai respons strategis untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan tersebut dan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam layanan pertanahan (Manthovani & Istiqomah, 2021).

Penerapan sertipikat elektronik dipandang sebagai solusi komprehensif terhadap berbagai persoalan klasik dalam administrasi pertanahan seperti kehilangan dokumen, pemalsuan, dan lambatnya proses administrasi pertanahan yang sering menimbulkan keluhan masyarakat. Meskipun penerbitan sertipikat elektronik memberikan berbagai keuntungan masih ada kekhawatiran mengenai keamanan data serta keaslian dokumen elektronik tersebut (Adinegoro, 2023). Dengan integrasi basis data dan tanda tangan elektronik, proses pendaftaran dan verifikasi dapat dipercepat serta diawasi secara lebih sistematis. Namun, transformasi ini bukan semata teknis tetapi juga menuntut penyesuaian regulasi, kesiapan infrastruktur, dan penerimaan sosial dari masyarakat pengguna layanan (Dewi & Susantio, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa manfaat sertipikat elektronik mencakup peningkatan kepastian hukum, pengurangan risiko mafia tanah, dan efisiensi waktu pelayanan. Di sisi lain, penelitian juga menyoroti tantangan implementasi seperti kebutuhan sosialisasi, literasi digital masyarakat terutama di kalangan lansia dan masyarakat pedesaan, interoperabilitas data antar sistem pemerintahan, ketersediaan infrastruktur internet yang memadai, serta kapasitas

sumber daya manusia di kantor pertanahan. Persepsi masyarakat terhadap inovasi ini menjadi indikator krusial keberhasilan implementasi di tingkat daerah (Dewi & Susantio, 2024). Oleh sebab itu, persepsi masyarakat terhadap inovasi tersebut menjadi indikator krusial keberhasilan implementasi kebijakan dan menjadi dasar untuk perbaikan sistem secara berkelanjutan.

Persepsi masyarakat terhadap layanan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman layanan sebelumnya, keterbukaan dan aksesibilitas informasi mengenai prosedur layanan, kemudahan akses teknologi dan infrastruktur pendukung, literasi digital masyarakat dan teknologi yang dimiliki serta kepercayaan terhadap kantor pertanahan. Dalam konteks layanan pertanahan, masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital atau yang mungkin berada di wilayah dengan akses internet terbatas mungkin banyak yang masih merasa ragu terhadap keamanan sertipikat elektronik maupun mekanisme pengamannya yang berbasis teknologi. Sementara pengguna yang lebih melek teknologi, terutama generasi muda dan masyarakat urban, cenderung melihatnya sebagai kemajuan positif yang memberikan kemudahan, kecepatan dan transparansi dalam pengurusan dokumen pertanahan. Untuk itu, memahami cakupan persepsi ini penting untuk merancang strategi sosialisasi dan layanan yang responsif (Elora, 2024).

Kabupaten Bojonegoro merupakan sebagai salah satu wilayah yang turut menjalankan program digitalisasi menunjukkan perkembangan signifikan penerbitan sertipikat elektronik melalui program-program seperti PTSL, program legalisasi aset, serta berbagai inisiatif lokal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam upaya mempercepat pendaftaran tanah. Berbagai laporan data administratif dan pemberitaan media lokal menunjukkan adanya peningkatan jumlah sertipikat elektronik yang diterbitkan dari tahun ke tahun, namun pemahaman masyarakat tentang aspek hukum, teknis, keamanan, dan prosedur dari penggunaan sertipikat elektronik masih berbeda-beda antarwilayah dan kelompok masyarakat. Maka, penelitian fokus pada persepsi masyarakat Kabupaten Bojonegoro menjadi relevan untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan (Suara Bojonegoro, 2024).

Penerapan sertipikat elektronik sebagai bagian dari digitalisasi layanan pertanahan merupakan kebijakan strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka meningkatkan kepastian hukum, efisiensi pelayanan, serta tertib administrasi pertanahan. Meskipun

kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, namun masih mengalami berbagai dinamika dan tantangan dalam implementasi pada Kantor Pertanahan.

Dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan, terdapat indikasi bahwa pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap sertipikat elektronik masih belum sepenuhnya merata. Sementara, sisanya menunjukkan sikap ragu terhadap aspek keamanan data dan keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Perbedaan persepsi tersebut berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan berbasis elektronik serta efektivitas pelaksanaan kebijakan digitalisasi pertanahan secara keseluruhan. Selain itu, perbedaan latar belakang sosial, tingkat pendidikan, literasi digital, serta pengalaman masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan pertanahan juga turut mempengaruhi terhadap terbentuknya cara pandang masyarakat mengenai penerapan sertipikat tanah elektronik.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai sertipikat elektronik cenderung menitikberatkan pada aspek yuridis dan normatif, seperti kedudukan sertipikat elektronik sebagai alat bukti dan kepastian hukumnya. Sementara itu, kajian yang menggali persepsi masyarakat secara empiris, khususnya pada kantor pertanahan masih relatif terbatas. Akan tetapi, persepsi masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis digital serta menjadi dasar evaluasi dan perumusan strategi perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepada masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dengan mengangkat judul “ **Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro**” yang berfokus pada analisis mendalam mengenai pemahaman, pengalaman layanan, kepercayaan, dan sikap penerimaan masyarakat terhadap penerapan sertipikat elektronik sebagai bukti kepemilikan tanah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai respon masyarakat terhadap kebijakan sertipikat elektronik serta menjadi dasar penyusunan strategi pelayanan untuk meningkatkan penerimaan layanan pertanahan berbasis digital yang lebih efektif, responsif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penerapan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana strategi pelayanan yang diterapkan agar dapat meningkatkan penerimaan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis persepsi masyarakat mengenai penerapan pelaksanaan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.
- b. Menganalisis strategi pelayanan dalam meningkatkan penerimaan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini menjadi kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap penerapan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.
- b. Bagi Masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sertipikat elektronik agar mereka lebih siap menerima serta memanfaatkan layanan tersebut secara optimal.
- c. Bagi Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan layanan sertipikat elektronik dan dasar penyusunan program sosialisasi serta peningkatan kualitas pelayanan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Persepsi Masyarakat Terhadap Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

1. Pemahaman

Secara umum pemahaman masyarakat terhadap sertipikat elektronik masih beragam namun, menunjukkan kecenderungan positif. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap 15 orang informan pemohon yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memahami konsep sertipikat elektronik sebagai bentuk digital dari sertipikat tanah yang memberikan kemudahan akses dan efisiensi pelayanan. Masyarakat mulai memahami bahwa sertipikat elektronik memiliki fungsi dan kekuatan hukum yang sama atau setara dengan sertipikat analog. Akan tetapi, masih terdapat sebagian masyarakat, khususnya kelompok lansia dan pedesaan cenderung memiliki literasi digital yang rendah, serta belum memahami secara keseluruhan mengenai sertipikat elektronik. Temuan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan pelaksana 3 orang informan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap layanan sertipikat elektronik masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih merata.

2. Kepercayaan

Sebagian masyarakat sudah percaya bahwa sertipikat elektronik memiliki keamanan dan kekuatan hukum yang sama dengan sertipikat analog karena dilengkapi sistem keamanan digital seperti tanda tangan elektronik dan *QR code*. Namun, masih terdapat masyarakat yang memiliki kekhawatiran terhadap keamanan data, risiko kehilangan dokumen digital, kemungkinan penyalahgunaan sistem elektronik.

3. Pengalaman Layanan

Sebagian besar informan menilai bahwa pelayanan sertipikat elektronik lebih cepat, praktis, dan efisien dibandingkan dengan sertipikat analog. Meskipun

ada beberapa masyarakat masih mengalami kendala dalam memahami alur dan prosedur pelayanan maupun penggunaan teknologi digital.

4. Sikap Penerimaan

Masyarakat menerima penerapan sertipikat elektronik karena dianggap memberikan kemudahan, efisiensi waktu dan biaya pelayanan pertanahan. Meskipun ada beberapa orang yang menunjukkan sikap pasrah terhadap kebijakan yang berlaku di kantor pertanahan dan berusaha belajar menghadapi perubahan menuju sistem digital.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat dan pelaksana pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, strategi pelayanan yang diterapkan untuk meningkatkan penerimaan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan cara pendekatan persuasif, melalui beberapa langkah yaitu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara tepat sasaran, memberikan penjelasan mengenai keamanan dan keabsahan sertipikat elektronik secara transparan, meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelayanan loket, pendampingan khusus, peningkatan sarana dan prasarana, serta menerapkan sistem pelayanan ramah. Dengan adanya strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, kepercayaan, pengalaman layanan, serta sikap penerimaan masyarakat terhadap penerimaan sertipikat elektronik secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro diharapkan lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai sertipikat elektronik terutama keamanan dan keabsahan data secara intensif dan berkelanjutan, khususnya kepada wilayah pedesaan dan masyarakat yang memiliki literasi digital rendah guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, perlu meningkatkan kualitas pelayanan digital dengan menyediakan pendamping khusus bagi masyarakat yang mengalami kesulitan serta menjamin stabilitas sistem informasi pertanahan agar tidak terjadi kendala teknis saat masyarakat mengakses data.
2. Bagi masyarakat diharapkan cepat beradaptasi dengan perubahan digital, lebih aktif mencari informasi guna meningkatkan pemahaman mengenai sertipikat elektronik serta tidak ragu untuk berkonsultasi secara langsung maupun via online kepada

Kantor Pertanahan untuk menghindari informasi yang keliru (*hoax*) .

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan metode pengumpulan data tidak hanya teknik dokumentasi, observasi, wawancara tetapi secara kuantitatif misalnya menyebarkan kuisioner atau angket sehingga dapat mengukur secara statistik faktor-faktor apa saja yang signifikan memengaruhi pemahaman, pengalaman pelayanan, kepercayaan serta sikap penerimaan sertipikat elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Samara & Metta Susanti. (2023). Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Pengalaman Pengguna Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Penggunaan Aplikasi Dompot Digital (E-Wallet) di Kalangan Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), 249–260. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2.700>
- Fahmi, A. R. (2025). Digital Public Services and Citizen Trust in Government. *VISIONER*, 17(2), 49–60.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *JURNAL ILMIAH WAWASAN INSAN AKADEMIK*, 1 No. 3.
- La Ance Paulus, Rulinawaty, & Adrian Tawai. (2025). PUBLIC TRUST (TRUST IN SERVICE) TERHADAP E-GOVERNMENT PENGAWASAN INSPEKTORAT PADA PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BUTON TENGAH. *Journal Publicuho*, 8(1), 187–198. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.679>
- Manthovani, R., & Istiqomah, I. (2021). PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(2), 23. <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i2.744>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(2), 130. <https://doi.org/10.19184/Jik.V4i2.41314>
- Aditya, T. W. (2025). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya* [Skripsi Sarjana Terapan]. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (Stpn) Yogyakarta.
- Akbar, R. F. (2015). Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.21043/Edukasia.V10i1.791>
- Ariyantara, A. B. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Siswa Kelas Vii Smp Negeri 4 Wates Terhadap Proses Pembelajaran Permainan Bolabasket* [Universitas Negeri Yogyakarta]. <https://eprints.uny.ac.id/37927/1/Skripsi.pdf>
- Ben, F. R. (2009). *Gambaran Persepsi Keselamatan Berkendara Sepeda Motor Pada Siswa/I Sekolah Menengah Atas Di Kota Bogor* <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old12/125416-s-5609-gambaran%20persepi-literatur.pdf>
- Dewi, R. A. R. M., & Susantio, C. (2024). Penggunaan Sertipikat Elektronik Untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah Dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(9), 3382–3392. <https://doi.org/10.46799/Jsa.V5i9.1441>
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

- Elen, T., Mayangsari, S., & Prihatini, D. (2023). *Buku Profesi Akuntan Publik, Kini Dan Nanti: Persepsi Kebutuhan Akan Jasa Audit*. Deepublish. <https://Deepublishstore.Com/Produk/Buku-Profesi-Akuntan/>
- Elora, D. (2024). Problematika Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 762–773. <https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.13834686>
- Elora, D. (2024). Sertipikat Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pertanahan Di Indonesia: Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Digitalisasi Hak Milik. *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 72–81. <https://Doi.Org/10.55904/Cessie.V3i2.1509>
- Harsono, B. (2013). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Revisi). Universitas Trisakti.
- Manthovani, R., & Istiqomah, I. (2021). Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2 (2), 23. <https://Doi.Org/10.36722/Jmih.V2i2.744>
- Meiliawati, I. (2024). Memperkuat Tata Kelola Pertanahan Melalui Digitalisasi Dan Reformasi Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Online Graha Kirana*, 3(2), 76–90. <https://Doi.Org/10.61715/Jll.V3i2.93>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994a). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994b). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage.
- Mochammad Abyan Jagadhita. (2025). Transformasi Digital Sertipikat Tanah Dan Respons Masyarakat Terhadap Penerapannya. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 1600–1620. <https://Doi.Org/10.26623/Julr.V8i3.12448>
- Moleong, L. J. (2014a). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Pt Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2014b). *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Pt Remaja Rosdakarya.
- Muktamar, A., & Ramadani, T. F. (2023). Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 1141–1158.
- Nisa, A. H., Hasna, H., & Yarni, L. (2023). Persepsi. *Koloni*, 2(4), 213–226. <https://Doi.Org/10.31004/Koloni.V2i4.568>
- Pandega, M. Z. S., Rivaldi, S., & Aliyan, S. A. (2023). Implementasi Geo-Kkp Sebagai Penerapan E-Government Di Bpn Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(3), 747–753. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/592206> Implementasi-Geo-Kkp-Sebagai-Penerapan-E-87be90a9.Pdf
- Putranto, I. D. M., & Mansyur, A. (2023). Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Secara Elektronik. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(1), 15–26.

- <https://doi.org/10.28946/Rpt.V12i1.2645>
- Rachmah, A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2023). Implementation Of Electronic Land Certificates As Legal Land Ownership. *Policy Law Notary And Regulatory Issues (Polri)*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.55047/Polri.V3i1.900>
- Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan*.
- Sabarini, S. S., Liskustyawati, H., Sunardi, Satyawan, B., Nugroho, D., & Nugroho Putra, B. (2021). *Persepsi Dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan Mengimplementasikan E-Learning Pada Masa Pandemi Covid-19*. Deepublish.
- Sapardiyono, S., & Pinuji, S. (2022). Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan Dan Hak Atas Tanah Melalui Sertipikat Tanah Elektronik. *Widya Bhumi*, 2(1), 54–64. <https://doi.org/10.31292/Wb.V2i1.19>
- Sarwono, S. W. (2009). *Pengantar Psikologi Umum*. Rajawali Pers.
- Setyono, D. R. Y. (2024). *Pelaksanaan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi* [Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35450>
- Siti Marfu'ah, Ana Kumalasari, & Ida Swasanti. (2024). Digitalisasi Pelayanan Publik: Ketidaksiapan Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di
- Bojonegoro. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 271–283. <https://doi.org/10.23969/Kebijakan.V15i02.12309>
- Soraya, N. (2018). Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi Pai Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Raden Fatah
- Palembang. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 183–204. <https://doi.org/10.19109/Tadrib.V4i1.1957>
- Suara Bojonegoro. (2024). *Kantah Bojonegoro: Ptsl Solusi Tepat Cegah Konflik Sengketa Tanah*. suarabojonegoro.com. <https://suarabojonegoro.com/kantah-bojonegoro-pts-l-solusi-tepat-cegah-konflik-sengketa-tanah/>
- Sugianto, Q. F. (2020). Peluang Dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital. *Notarius*, 12(2), 656–668. <https://doi.org/10.14710/Nts.V12i2.29004>
- Sutedi, A. (2023). *Sertipikat Hak Atas Tanah*. Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books/about/Sertipikat_Hak_Atas_Tanah.html?id=WmSqeaaaqbaj
- Vardiansyah, D. (2008). *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Andi.
- Wang, P., Hahm, C., & Hammer, P. (2022). A Model Of Unified Perception And Cognition. *Frontiers In Artificial Intelligence*, 5, 806403. <https://doi.org/10.3389/Frai.2022.806403>
- Widiyantoro, S., I.G. Nyoman Guntur, Nur Rahmanto, & Dwi Wahyuningrum. (2022).

Tantangan Menuju Penerapan Sertipikat Elektronik Di Kota Dan Kabupaten Magelang. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 97–106. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.7452>

Wurarah, M. (2022). *Implikasi Prior Knowledge, Persepsi Siswa Pada Kemampuan Guru Dan Kebiasaan Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Biologi: (Studi Kasus Pada Siswa Sma Negeri Di Kota Manado)*. Bintang Semesta Media. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/bk56303/implikasi-prior-knowledge-persepsi-siswa-pada-kemampuan-guru-dan-kebiasaan-belajar-siswa-terhadap-hasil-belajar-biologi-studi-kasus-pada-siswa-sma-negeri-di-kota-manado>